

Dekonstruksi Peran Diplomasi Perempuan Dalam Teks Pidato Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi

Adhe Riatin Supriatin*, Frengki Napitupulu

Universitas Sahid Jakarta, Indonesia

*adhe.pscoach@gmail.com

Abstract

This study aims to deconstruct the meaning of women's diplomacy in the speech delivered by Indonesia's Foreign Minister Retno Marsudi at the 2024 Gagas RI Forum entitled "Women and Indonesia's Diplomacy on the Global Stage." The research adopts a critical qualitative approach using Jacques Derrida's theory and method of deconstruction. The unit of analysis is the official transcript of the speech, analyzed through Peter Barry's three levels of deconstructive reading: verbal, textual, and linguistic. The results reveal numerous gaps, contradictions, and fractures within the text that destabilize the idealized narrative of female diplomacy. The presence of Kartini as a metaphor, while intended to symbolize women's empowerment, instead exposes ambiguities between female agency and submission under patriarchal structures. These findings suggest that the diplomatic text embodies ideological tensions and fragmented meanings that diverge from the speaker's intentions. This study contributes to the fields of political communication, diplomacy studies, and critical discourse analysis by offering new interpretations of women's representation in public and diplomatic discourse.

Keywords: female diplomacy, deconstruction, Jacques Derrida, political speech, diplomatic meaning

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi makna diplomasi perempuan dalam teks pidato Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, pada Forum Gagas RI 2024 bertajuk "Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global." Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif kritis dengan teori dan metode dekonstruksi Jacques Derrida. Unit analisis berupa transkrip pidato resmi dianalisis menggunakan tiga tahap pembacaan dekonstruktif menurut Peter Barry: tahap verbal, textual, dan linguistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks pidato tersebut mengandung berbagai celah, kontradiksi, dan retakan makna yang menjadikan narasi diplomasi perempuan tidak stabil dan tidak final. Simbol Kartini yang dihadirkan sebagai metafora perjuangan justru memunculkan ambiguitas makna antara keideal dan ketundukan perempuan dalam sistem patriarki. Temuan ini menunjukkan bahwa teks diplomasi perempuan sarat dengan pertarungan ideologis yang tidak selalu selaras dengan maksud penuturnya. Penelitian ini berkontribusi pada kajian komunikasi politik, studi diplomasi, dan teori wacana kritis, serta membuka ruang interpretasi baru terhadap representasi perempuan dalam ruang publik dan diplomasi.

Kata kunci: diplomasi perempuan, dekonstruksi, Jacques Derrida, pidato politik, makna diplomasi

PENDAHULUAN

Simone De Beauvoir "*defenisi perempuan tidak akan pernah bisa difinalkan*", demikian pula kiprah diplomasi perempuan, makna-makna baru akan kehadiran perempuan akan berhadapan dengan makna tunggalnya (Salmieri, 2016). Menyusuri jejak atau 'trace' diplomasi perempuan akan mengajak kita pada makna-makna baru dan selalu gagal untuk distabilkan. Penelitian ini mengangkat gagasan filosofis postmodernisme, yang memungkinkan matinya logosentrisme dan menafikan metafisik kehadiran atas teks. Gagasan yang dikatakan Lyotard kematian meta narasi serta keberanian menyatakan "kematian analisis oposisi biner". 'Perbedaan dan penangguhan dalam bahasa' yang dinyatakan Jacques Derrida, sebagai salah satu tokoh postmodernisme dengan mengatakan bahwa bahasa tidak lagi memiliki hubungan yang jelas dengan representasi "realitas" dan tidak lagi dapat memberikan gambaran yang jelas dan jelas tentang dunia di sekitarnya. Bahasa dianggap sebagai media yang licin dan ambigu, yang dapat membuat pemahaman yang jelas justru menjadi tidak pasti (Carpentier, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bentuk instabilitas (ketidakstabilan) makna. Derrida melalui dekonstruksinya mengatakan '*tidak ada sesuatu diluar teks*'. Derrida menyebutnya dengan istilah "*penundaan*" (Mohan, 2022). Dekonstruksi berupaya '*menunda*' makna yang terungkap langsung dari teks pidato Menlu Retno Marsudi pada acara Forum Gagas RI yang diselenggarakan Kompas TV dengan tajuk "Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global". Pembacaan dekonstruktif akan melepas belenggu teks yang diciderai dengan kehadiran Retno sebagai penutur teks. Teks tidak lagi bergantung pada subjek tertentu; sebaliknya, ia memungkinkan dirinya untuk memahami secara mandiri dalam ruang pemaknaan yang tak terbatas. Dalam penelitian ini penulis akan mencari bukti adanya celah, patahan, retakan, dan diskontinuitas dalam berbagai bentuk dari teks yang diteliti (Aggestam & Towns, 2018).

Penelitian ini melepaskan diri atas logosentrisme dalam hal ini adalah subyek seorang menteri luar negeri pertama perempuan yang diamanatkan menjalankan tugas sebanyak dua kali di era pemerintahan Joko Widodo, karena dalam dekonstruksi tidak ada '*keidealan*' sebagaimana bantahan Derrida atas keidealan yang disampaikan Husserl melalui "*rumusan-rumusan matematika itu merupakan realitas yang secara nomatik bersifat permanen (objectivitas ideal)*". Bagi Derrida tidak ada sesuatu yang ideal jika masih menggunakan bahasa, seperti tidak ada yang ideal bagi perempuan jika masih kuat budaya patriarkis yang memaksa perempuan untuk keluar dari peradaban berpuluhan abad lamanya.

Demikian juga keidealan perempuan dalam diplomasi, bagi Derrida tidak ada makna akhir yang secara historis terjadi dalam makna diplomasi perempuan di Indonesia. Makna tunggal dari diplomasi adalah maskulinitas. Seorang diplomat tidak pernah bisa bicara atas namanya sendiri. Ketika orang bicara tentang keberhasilan perempuan ternyata harus ada sisi-sisi yang dikritik secara ideologis. Dia tidak pernah bisa menunjukkan dirinya sendiri sebagai perempuan, ada manipulasi atas diri perempuan untuk kepentingan diplomasi. Teks sepaham dengan makna tunggal, maka makna diplomasi perempuan yang masih terkubur dan bersembunyilah yang akan diinterpretasikan secara radikal melalui pembacaan makna-makna marginal yang bisa jadi belum terungkap, karena bagi Derrida tidak ada makna absolut dalam sebuah teks, makna-makna akan baru akan selalu mengintai bagi sebuah teks untuk dipahami. Pembongkaran makna atas teks bersifat terbuka, agar kesadaran tentang makna tidak terdistorsi secara sistematis oleh tradisi dan otoritas, agar kita dapat melihat sebuah bingkai realitas yang lebih dalam.

Selain menggunakan dasar teori dekonstruksi, penelitian ini sekaligus menjadikan dekonstruksi sebagai sebuah metode, seperti yang dilakukan Peter Barry dalam mendekonstruksi teks. Tiga tahap dekonstruksi itu antara lain: *verbal*, *tekstual*, dan *linguistik*. Dalam *tahap pertama*, yaitu tahap verbal, analisis kritis dilakukan dengan mengeksplorasi paradoks dan kontradiksi yang terdapat dalam teks. Meneliti sejauh mana 'penanda' berperang dengan 'yang ditandakan', juga menyoroti rincian teks yang tampak sepele - seperti keberadaan *metafora* tertentu - dan kemudian memanfaatkannya sebagai kunci untuk memahami keseluruhan teks, sehingga semua aspek dapat dibaca melalui lensa tersebut. *Tahap kedua*, *tahap tekstual*, langkah menuju pencarian lebih dalam tentang makna teks secara keseluruhan Dekonstruktif, atau pembaca teks, mencari celah, ketidakpastian, atau pendirian. Menurut prosedur kedua ini, teks tidak terintegrasi dan tujuan tidak konsisten. Perhatikan bahwa *kelalaian* penting di sini, yaitu, ketika sebuah teks tidak memberi tahu kita hal-hal yang kita harapkan untuk diceritakan. Mendeteksi dari tingkat 'tekstual' skala besar yang berisi pemutusan dan *ketidaksinambungan* teks Prosedur kedua ini menunjukkan bahwa teks tidak terintegrasi dan tujuan yang ditetapkan tidak konsisten. *Tahap ketiga* melibatkan *proses linguistik*. Pembaca menemukan titik-titik tertentu dalam teks, seperti ketika kelayakan bahasa (teks) dipertanyakan. Misalnya, ketika bahasa sebagai medium dibahas, bahasa dianggap berlebihan, keliru dalam menunjukkan objeknya, dan sebagainya.

Studi mengenai diplomasi perempuan di Indonesia relatif terbatas. Penelitian Sarah Astried (2019) mengenai keterlibatan *female peacekeepers* Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam diplomasi

pertahanan. Namun, peran mereka masih ditempatkan sebagai pelengkap atau simbol, bukan sebagai aktor utama dalam proses perundingan dan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam konstruksi diplomasi yang masih maskulin.

Penelitian Ayu Wulandari (2020) tentang diplomasi kebudayaan Indonesia pada era Soekarno menegaskan hal serupa. Meskipun perempuan memainkan peran dalam ranah diplomasi budaya, kehadiran mereka terbatas pada fungsi representatif sebagai penari, pelukis, atau ikon budaya bukan sebagai pengambil kebijakan. Dominasi tokoh publik perempuan dari kalangan elit semakin memperlihatkan ketimpangan akses perempuan biasa terhadap ruang diplomasi.

Dalam studi lanjutan, Wulandari (2021) menyoroti tiga tokoh diplomat perempuan era awal kemerdekaan Indonesia Maria Ulfah Soebadio, Laili Roesad, dan Supeni Pudjobuntoro. Ketiganya merupakan figur feminis yang dihadirkan dalam berbagai forum perundingan internasional. Namun, pada masa pemerintahan Soekarno pasca 1956, ketiganya terjebak dalam bayang-bayang diplomasi pribadi presiden, yang menggeser posisi mereka dari aktor menjadi alat representatif kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam diplomasi kerap dikendalikan oleh struktur kekuasaan patriarkal, sehingga peran mereka tidak sepenuhnya otonom.

Dari berbagai studi tersebut, jelas bahwa peran perempuan dalam diplomasi belum sepenuhnya merdeka. Penelitian ini mencoba menghadirkan perspektif baru melalui pembacaan dekonstruktif terhadap teks pidato Menlu Retno Marsudi. Pendekatan ini mengikuti prosedur dekonstruksi seperti yang dikembangkan Peter Barry (2017), yang meliputi tahap verbal (eksplorasi kontradiksi dalam bahasa), tekstual (pembacaan retakan dan ketidaksinambungan makna), dan linguistik (analisis terhadap kegagalan bahasa dalam menyampaikan maksud secara utuh). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji teks sebagai produk komunikasi politik, melainkan juga sebagai arena kontestasi makna. Teks pidato Retno Marsudi dibaca sebagai situs retakan ideologis yang membuka kemungkinan baru dalam memahami makna diplomasi perempuan bukan sebagai simbol keberhasilan tunggal, melainkan sebagai representasi yang terus digugat oleh ketidakseimbangan struktur. Dalam konteks ini, pemaknaan terhadap diplomasi perempuan menjadi proses terbuka, tidak final, dan senantiasa bergerak dalam ruang interpretasi yang dinamis (Aggestam & Towns, 2018; Papacharissi, 2015).

Penulis coba menemukan tentang makna diplomasi perempuan, dari sedikitnya penelitian tentang itu, seperti: diplomasi kebudayaan, *peran 'female peacekeeper'* hingga peran diplomasi perempuan di era Soekarno. Penelitian mencoba mengumpulkan semua makna-makna diplomasi yang hadir dari berbagai penelitian sebelumnya dan jejak literatur yang ada sebagai *historical situatedness*. Dimensi komunikasi dari Penelitian ini adalah pada pemasaran pesan (teks) dan interpretasi hermenutika radikal Derrida.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan utama mengenai bagaimana instabilitas makna dalam representasi diplomasi perempuan dalam teks pidato Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dapat diungkap melalui pendekatan dekonstruktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap ketegangan makna antara simbol pemberdayaan perempuan dan narasi patriarkis yang tersembunyi dalam konstruksi teks pidato tersebut. Dengan menggunakan pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida, yang kemudian dijabarkan dalam tiga tahap pembacaan menurut Peter Barry, yakni tahap verbal, textual, dan linguistik, penelitian ini menganalisis struktur wacana dalam teks pidato sebagai medan pertarungan makna yang tidak pernah final. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian komunikasi politik dan diplomasi, khususnya dalam memahami bagaimana praktik representasi gender dalam diplomasi dapat dibaca ulang melalui perspektif dekonstruktif yang menolak makna tunggal dan membuka ruang bagi pembacaan alternatif yang lebih kritis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana dekonstruktif yang berpijak pada filsafat Jacques Derrida. Dekonstruksi dalam konteks ini digunakan untuk mengungkap instabilitas makna, ambiguitas, serta kontradiksi yang tersembunyi dalam teks

pidato Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pendekatan ini bertujuan membongkar dominasi narasi yang tampak stabil namun sebenarnya dibangun melalui struktur wacana yang tidak utuh. Sebagaimana dijelaskan oleh Ardianto (2021), pendekatan dekonstruksi mampu membongkar representasi perempuan dalam media, dengan menekankan bahwa makna-makna dalam teks selalu terbuka terhadap tafsir dan pembacaan ulang.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kerangka kerja Peter Barry sebagaimana dikembangkan dalam studi-studi komunikasi di Indonesia. Tahap pertama adalah pembacaan secara verbal, yang memusatkan perhatian pada penggunaan bahasa, termasuk metafora dan paradoks yang muncul dalam teks. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketegangan antara penanda dan petanda, serta ketidaksesuaian antara makna literal dan makna simbolik. Tahap berikutnya adalah pembacaan tekstual, di mana peneliti menelusuri struktur naratif teks secara keseluruhan untuk mengungkap celah atau retakan makna, serta bagian-bagian yang hilang atau tidak konsisten. Tahap ini mengikuti pendekatan yang digunakan oleh Hidayat (2021) dalam analisis pidato politik, yang menunjukkan bahwa teks pidato sering menyimpan agenda ideologis yang tersembunyi. Tahap terakhir adalah pembacaan linguistik, yaitu telaah terhadap bahasa sebagai sistem yang tidak netral. Bahasa dalam pidato tidak dianggap sebagai sarana representasi objektif, tetapi sebagai konstruksi yang dapat menunda dan menggagalkan makna itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Sari (2020) dalam kajian mengenai identitas dan representasi dalam teks media.

Sumber data dalam penelitian ini adalah teks pidato Retno Marsudi dalam acara "Forum Gagas RI" bertajuk "Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global" yang disiarkan oleh Kompas TV. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan transkripsi yang tersedia di media daring, kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan prinsip hermeneutika dekonstruktif. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi teori, yakni dengan memadukan teori dekonstruksi Derrida dengan pendekatan post-strukturalis dalam studi komunikasi politik. Dengan cara ini, penelitian ini tidak bermaksud menemukan makna tunggal atau esensial dari pidato, melainkan membuka peluang bagi interpretasi alternatif yang menggugat dominasi makna patriarkal dalam diplomasi, dan memberikan ruang bagi pemaknaan baru yang lebih inklusif dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Verbal: Mengurai Paradoks dan Ambiguitas Simbol Kartini

Tahap verbal dalam pendekatan dekonstruksi berfokus pada pengungkapan kontradiksi, ambiguitas, dan paradoks dalam struktur teks. Dalam pidato Retno Marsudi, momen awal ketika ia menyampaikan ucapan "Selamat Hari Kartini" menjadi titik masuk penting bagi pembacaan dekonstruktif. Secara permukaan, ucapan tersebut tampak sebagai bentuk penghormatan terhadap R.A. Kartini sebagai ikon emansipasi perempuan Indonesia. Namun, ketika diletakkan dalam kerangka narasi besar pidato yang lebih menekankan diplomasi global, simbol Kartini justru tampak sebagai penanda yang tidak terintegrasi secara substansial. Kartini muncul sebagai simbol emansipasi yang dipinjam secara retoris, namun tidak dijelaskan keterkaitannya dengan strategi konkret atau pencapaian perempuan dalam dunia diplomasi kontemporer. Kontradiksi ini menghadirkan ketegangan makna antara bentuk penghormatan simbolik dengan substansi narasi diplomasi, yang pada gilirannya menunjukkan bahwa teks ini sedang bermain dalam level simbolik tanpa konsistensi semantik. Dengan demikian, retorika penghormatan terhadap Kartini menjadi bentuk pelapisan makna yang ambigu seolah-olah mendukung pemberdayaan perempuan, namun sesungguhnya meminggirkan signifikansi peran konkret perempuan dalam wacana diplomasi yang sedang dibicarakan.

Tahap Tekstual: Ketidaksinambungan Narasi dan Representasi Gender

Pada tahap tekstual, pendekatan dekonstruktif menyoroti kontradiksi dalam struktur narasi secara keseluruhan. Dalam pidato Menlu Retno, terdapat dualitas yang tidak dapat dihindari antara posisi dirinya sebagai perempuan dalam jabatan tinggi dan narasi besar yang ia bawa. Sebagai

perempuan pertama yang menjabat Menteri Luar Negeri RI selama dua periode, eksistensi Retno seharusnya mampu menghadirkan narasi baru tentang diplomasi yang lebih inklusif terhadap pengalaman dan perspektif perempuan. Namun yang terjadi adalah narasi yang ia sampaikan tetap berada dalam bingkai maskulin negara dan institusi, tanpa ada pembaruan diskursif terhadap peran perempuan itu sendiri. Perempuan ditampilkan sebagai bagian dari mesin diplomasi negara, bukan sebagai subjek yang secara aktif mendefinisikan ulang makna diplomasi itu sendiri. Teks pidato tersebut terjebak dalam bentuk representasi simbolik perempuan yang diklaim sebagai "kemajuan," padahal tidak memberi ruang kritis bagi wacana feminis yang lebih radikal. Ketegangan ini memperlihatkan diskontinuitas makna, di mana Retno sebagai figur perempuan justru tidak dapat melepaskan diri dari konstruksi patriarkis yang melingkupi struktur diplomasi.

Tidak ada eksplorasi naratif tentang bagaimana pengalaman perempuan dapat mereformasi pendekatan diplomatik. Sebaliknya, pidato tersebut cenderung mereproduksi struktur lama dengan wajah baru: seorang perempuan yang tetap berbicara dalam logika diplomasi konvensional. Maka, dari perspektif dekonstruksi, struktur teks ini mengandung celah dan retakan dalam penyampaian makna. Pidato tersebut tampak seperti sedang menyuarakan pemberdayaan, tetapi struktur naratifnya justru memperkuat dominasi wacana yang lama. Ketidaaan narasi alternatif atau pengalaman otentik perempuan diplomat menunjukkan bahwa teks ini tidak utuh, penuh omisi, dan kehilangan koherensi ketika diuji melalui pembacaan yang kritis terhadap struktur internalnya.

Tahap Linguistik: Ketegangan Bahasa dan Kekuasaan dalam Teks Diplomasi

Pendekatan linguistik dalam dekonstruksi melihat bagaimana bahasa sebagai medium tidak netral dan sarat dengan kekuasaan, ideologi, serta konstruksi makna yang tersembunyi. Dalam pidato Retno Marsudi, sejumlah istilah diplomatik digunakan secara konsisten, seperti "berkomitmen," "keprihatinan mendalam," "solidaritas internasional," dan "peran aktif Indonesia." Kata-kata ini secara permukaan tampak mewakili nilai-nilai universal yang netral dan positif, namun ketika ditelaah secara dekonstruktif, bahasa tersebut justru tunduk dan melayani narasi hegemonik negara. Ini sejalan dengan pemikiran Jacques Derrida bahwa bahasa tidak pernah polos atau obyektif, tetapi merupakan arena pertarungan makna yang sarat dengan penundaan (*différance*) dan pengaburan. Istilah-istilah yang digunakan Menlu tampak berulang dan terstandarisasi, menciptakan kesan stabilitas dan kejelasan, padahal makna sebenarnya bersifat ambigu dan bisa dipertanyakan.

Alih-alih memperlihatkan subjektivitas perempuan sebagai pembawa narasi alternatif, teks pidato justru menguatkan praktik diskursif yang meminggirkan pengalaman khas perempuan. Kata "solidaritas" misalnya, tidak dijelaskan secara substantif bagaimana perempuan terlibat dalam wacana solidaritas internasional itu sendiri, dan kepada siapa solidaritas itu diarahkan. Bahasa dalam teks ini menciptakan kesan objektivitas institusional, namun sekaligus menutupi berbagai kemungkinan narasi lain yang tidak diartikulasikan secara eksplisit, termasuk suara perempuan yang berada di luar struktur formal diplomasi negara.

Dengan demikian, bahasa dalam pidato tersebut bukanlah alat netral komunikasi, melainkan instrumen kekuasaan yang menjaga narasi diplomasi tetap dalam koridor dominasi negara. Seperti ditegaskan oleh Eagleton (1996), bahasa dapat menjadi kendaraan ideologi yang menyamarkan dominasi dan mempertahankan status quo. Dalam konteks ini, pilihan dixi yang tampak inklusif seperti "perempuan" dan "kesetaraan" justru menjadi simbol kosong, terjebak dalam performativitas retorika tanpa keberanian untuk mendekonstruksi ulang relasi kuasa yang masih berlangsung dalam praktik diplomasi. Bahasa yang digunakan dalam teks bukan hanya merepresentasikan makna, tetapi juga menyembunyikan, memanipulasi, dan mengarahkan pemahaman publik ke dalam horizon wacana resmi. Maka, dari perspektif dekonstruksi, pidato tersebut mencerminkan kegagalan bahasa dalam menampung keragaman makna dan identitas. Ia justru menjadi monolog ideologis yang mengaburkan ruang bagi alternatif narasi, terutama yang bersumber dari pengalaman perempuan di luar struktur institusi negara.

Interpretasi Dekonstruktif atas Simbol Perempuan dalam Diplomasi Global

Dekonstruksi sebagai strategi membaca teks memungkinkan pembongkaran makna yang dianggap mapan dan dominan. Dalam konteks ini, pidato Retno Marsudi dibaca sebagai teks yang sarat dengan simbolisasi perempuan sebagai alat representasi negara. Kehadiran perempuan dalam diplomasi seringkali tidak mencerminkan transformasi struktural atas relasi kuasa, melainkan hanya bersifat kosmetik. Seperti yang diungkapkan oleh Aggestam dan Towns (2018), diplomasi feminis seringkali gagal melepaskan diri dari kerangka institusional patriarki yang mendefinisikan peran dan eksistensi perempuan dalam batasan-batasan simbolik. Hal ini menciptakan kondisi di mana perempuan tampil sebagai ikon kemajuan, namun tidak memiliki daya untuk membongkar struktur makna atau sistem representasi yang mengekang. Pidato Retno tidak menggugat struktur diplomasi konvensional; sebaliknya, ia mengukuhkan tatanan tersebut dengan wajah baru yang secara retoris melibatkan perempuan.

Dalam konteks dekonstruksi, ini merupakan bentuk pelanggengan makna lama melalui simbol baru, di mana perempuan direpresentasikan sebagai keberhasilan, tetapi tanpa disertai pembongkaran terhadap narasi maskulin yang menjadi dasar diplomasi itu sendiri. Dengan demikian, retorika kesetaraan dan pemberdayaan dalam teks tidak lebih dari permainan tanda yang terus menunda hadirnya makna substantif tentang kehadiran perempuan sebagai subjek yang otonom dan transformatif dalam diplomasi. Konsep "trace" Derrida hadir di sini sebagai jejak-jejak makna alternatif yang ditindas oleh dominasi simbolik, tetapi tetap mengintai dan menunggu untuk diaktifkan melalui pembacaan yang subversif dan radikal.

Tahap Linguistik: Ketegangan Bahasa dan Kekuasaan dalam Teks Diplomasi

Tahap linguistik dalam pendekatan dekonstruksi melihat bagaimana bahasa tidak netral, melainkan sarat dengan makna dan ideologi yang menyembunyikan dominasi tertentu. Dalam teks pidato Retno Marsudi, banyak penggunaan istilah seperti "diplomasi perdamaian," "komitmen," "kolaborasi," dan "solidaritas global." Kata-kata ini tampak inklusif dan progresif, namun ketika dibaca secara dekonstruktif, justru memperlihatkan bagaimana bahasa menjadi alat hegemonik yang mempertahankan tatanan simbolik diplomasi yang maskulin. Bahasa yang digunakan tampaknya merangkul semua pihak, namun sebenarnya menutupi ketimpangan struktural yang masih sangat kental dalam praktik diplomasi internasional.

Penggunaan istilah semacam itu membentuk narasi yang harmonis dan penuh semangat kolektif, namun tanpa kejelasan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari solidaritas tersebut. Ini sejalan dengan pandangan Fairclough (1995) bahwa wacana politik cenderung menggunakan strategi bahasa untuk menciptakan ilusi konsensus dan kebersamaan, padahal di dalamnya terdapat relasi kekuasaan yang tidak setara. Dalam konteks pidato Retno, retorika diplomasi perempuan dibentuk oleh struktur bahasa yang secara halus menundukkan pengalaman perempuan di bawah logika negara dan maskulinitas institusional.

Bahasa dalam pidato ini mengonstruksi representasi perempuan bukan sebagai subjek otonom, tetapi sebagai figur simbolik yang memperkuat legitimasi negara dalam arena global. Istilah "komitmen" dan "solidaritas global" digunakan berulang kali tanpa menunjukkan bagaimana pengalaman spesifik perempuan, terutama dari negara-negara Global South, termasuk Indonesia, diperhitungkan dalam narasi global tersebut. Retorika inklusivitas itu, seperti yang dikatakan oleh Spivak (1988) dalam kritiknya terhadap representasi, seringkali mengabaikan suara "subaltern" dalam hal ini, perempuan yang tidak memiliki akses langsung terhadap kekuasaan representasi formal.

Dengan demikian, pilihan dixi yang terdengar progresif sesungguhnya adalah bentuk pharmakon dalam pemikiran Derrida, racun sekaligus obat yang tampak menyembuhkan masalah kesetaraan gender, namun sebenarnya memperkuat struktur simbolik yang justru menyakitkan atau membungkam. Bahasa yang digunakan dalam teks menjadi ruang permainan tanda yang berputar dalam deferensi tanpa titik akhir makna, dan di sinilah dekonstruksi mengungkap bagaimana bahasa diplomasi digunakan bukan untuk membebaskan, melainkan untuk menyusun ulang dominasi lama dalam kemasan baru yang lebih dapat diterima secara politis.

Pendekatan dekonstruktif Derrida (1976) menegaskan bahwa tidak ada hubungan langsung antara bahasa dan realitas; bahasa itu sendiri adalah arena pertarungan kekuasaan. Dengan demikian, dixi diplomasi yang digunakan oleh Retno bukan semata narasi netral, melainkan reproduksi struktur kuasa yang membentuk siapa yang bisa bicara, dan siapa yang dibungkam.

Hal ini dikuatkan oleh penelitian Putri dan Wibisono (2022) dalam *Jurnal Komunikasi Global*, yang menyatakan bahwa diplomasi Indonesia belum memiliki keberpihakan bahasa terhadap kesetaraan gender. Diplomasi perempuan hanya dimunculkan sebagai pencitraan lembut (soft diplomacy), dan bukan bentuk penyadaran struktural. Bahasa menjadi instrumen penjinakan, bukan pembebasan.

Dalam wacana internasional, Krook dan True (2012) dalam “*International Feminist Journal of Politics*” menggarisbawahi bahwa diplomasi yang menampilkan perempuan sering terjebak dalam dixi simbolik dan kehilangan keberpihakan substantif. Ini menunjukkan bahwa tahap linguistik tidak hanya menyoal gaya bahasa, melainkan struktur makna yang mengontrol kesadaran kolektif.

Interpretasi Dekonstruktif atas Simbol Perempuan dalam Diplomasi Global

Integrasi dari tahap verbal, tekstual, dan linguistik memperlihatkan konstruksi simbolik yang tidak stabil dalam representasi diplomasi perempuan. Retno Marsudi, sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama yang menjabat dua periode, dijadikan simbol keberhasilan perempuan dalam panggung diplomasi. Namun, teks pidatonya justru menunjukkan keterbatasan dalam narasi emansipatif. Pidato itu lebih banyak bicara atas nama negara, bukan sebagai perempuan.

Simbolisasi perempuan seperti ini sering disebut sebagai “tokenism” oleh feminis poststrukturalis, yakni strategi representasi yang mengakomodasi keberadaan perempuan secara visual, namun tetap mempertahankan struktur maskulin di baliknya. Ini selaras dengan pemikiran Butler (1990), bahwa performa identitas seringkali tidak membawa perubahan struktural jika tidak disertai resistensi terhadap sistem yang mendasarinya.

Penelitian Aggestam dan Towns (2018) dalam “*International Affairs*” menunjukkan bahwa diplomasi feminis cenderung terjebak pada estetika simbolik tanpa mengubah kebijakan substantif. Di Indonesia, penelitian Wulandari (2020) dalam “*Jurnal Perempuan*” memperlihatkan bahwa meskipun perempuan telah masuk dalam ruang diplomasi, peran mereka masih dikendalikan oleh narasi negara yang cenderung patriarkis. Diplomasi perempuan menjadi ajang representasi, bukan transformasi. Dekonstruksi dalam hal ini memberikan pendekatan pembacaan alternatif. Retno Marsudi, bukan sebagai individu, tetapi sebagai jejak atau “trace” dari makna perempuan dalam diplomasi yang selalu tertunda dan tidak stabil. Dengan membongkar teks pidato melalui tiga tahap dekonstruksi, dapat dilihat bahwa diplomasi perempuan bukanlah narasi yang mapan, melainkan terus diproduksi ulang dalam kontradiksi simbolik.

Pembahasan

Tahap Verbal: Retakan dalam Ucapan Kartini

Tahap pertama dalam dekonstruksi menurut Peter Barry adalah tahap verbal, yang mengarahkan pembacaan pada kontradiksi dan ambiguitas dalam level kalimat dan ungkapan. Dalam pidato Retno Marsudi yang disampaikan dalam Forum Gagasan Indonesia oleh Kompas TV pada tema “Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global,” terdapat banyak dixi yang pada awalnya terlihat mengukuhkan posisi perempuan dalam diplomasi, namun dalam pembacaan lebih dalam justru mengandung retakan makna. Misalnya, ketika Retno mengatakan bahwa “perempuan Indonesia telah menjadi bagian penting dari diplomasi perdamaian dunia,” kita perlu bertanya, apakah ini pernyataan afirmasi atau sekadar simbolisasi representasi?

Dixi “bagian penting” tidak menunjukkan posisi struktural atau peran sebagai pembuat kebijakan; alih-alih, bisa saja itu merujuk pada fungsi simbolik atau peran representatif semata. Retorika tersebut selaras dengan kecenderungan diplomasi yang menggunakan perempuan sebagai “wajah lembut” dari negara, bukan sebagai penggerak kebijakan yang sejajar secara substantif dengan

laki-laki. Ini mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Ksenia Kudzko (2021) dalam tulisannya di “European Council on Foreign Relations”, bahwa diplomasi feminis sering dikaburkan oleh narasi “pengakuan simbolik” tanpa kehadiran nyata dalam proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain, bahasa yang digunakan dalam pidato tersebut berulang kali menekankan kesuksesan Indonesia melalui peran perempuan tanpa menyebutkan bentuk keterlibatan konkret, seperti posisi strategis yang dipegang perempuan dalam proses negosiasi atau pengambilan keputusan. Ini memperlihatkan “strategi retoris inklusif” yang dijelaskan oleh Nuraini (2021) dalam “Jurnal Komunikasi Global”, di mana narasi tentang perempuan dalam politik sering kali menggunakan bahasa yang inklusif namun tidak diikuti dengan kebijakan substantif.

Dalam kacamata dekonstruksi, diksi seperti “menjadi bagian dari perdamaian” atau “mengharumkan nama bangsa” dalam konteks pidato perempuan diplomat tidak serta merta menunjukkan emansipasi. Sebaliknya, bisa menjadi alat untuk mengukuhkan struktur dominan, di mana perempuan hadir hanya sebagai alat simbolik dari negara. Sebagaimana Derrida (1976) ungkapkan, bahasa adalah arena “penundaan makna” (*différance*), di mana kata-kata mengelak dari makna tunggal. Maka, pernyataan-pernyataan dalam pidato Retno Marsudi dapat dipahami sebagai retorika yang beroperasi dalam ranah simbolik, bukan substansi.

Retakan dalam narasi ini dapat diidentifikasi sebagai bentuk performativitas yang dijelaskan oleh Judith Butler (1990), di mana identitas perempuan diplomat dibentuk melalui pengulangan tindakan yang dikonstruksi oleh struktur dominan. Ketika perempuan diplomat menyebutkan keberhasilannya dalam bahasa diplomasi yang telah disusun negara, maka ia sedang mengulangi wacana negara dan bukan mengonstruksi narasi otentiknya sendiri. Dalam konteks ini, diplomasi perempuan menjadi ruang di mana makna terus ditunda dan tidak pernah mencapai otoritasnya sendiri.

Penelitian oleh Puspitasari dan Nugroho (2020) dalam “Jurnal Wacana Politik” juga menemukan bahwa representasi perempuan dalam ruang-ruang politik cenderung bersifat ornamental. Mereka menyebutkan bahwa dalam banyak pidato politik, perempuan digunakan sebagai “legitimasi moral” dari suatu kebijakan, tanpa memberi ruang aktual bagi suara mereka untuk membentuk kebijakan tersebut. Dengan kata lain, pidato Retno Marsudi harus dibaca sebagai teks yang tidak stabil, yang membawa jejak-jejak (*trace*) dari ide tentang emansipasi namun tetap dibelenggu oleh struktur retoris negara.

Tahap Tekstual: Ketidaksinambungan Narasi dan Representasi Gender

Tahap tekstual dalam pendekatan dekonstruktif Peter Barry menekankan pada pencarian celah, kontradiksi, dan ketidaksinambungan dalam struktur teks yang tampaknya utuh dan kohesif. Dalam konteks pidato Menlu Retno Marsudi, terdapat beberapa narasi besar yang tampak koheren pada permukaan, namun jika dibaca lebih dalam justru mengandung ketegangan makna yang signifikan. Misalnya, ketika Menlu menyatakan bahwa diplomasi Indonesia sangat terbantu oleh kontribusi perempuan, tetapi tidak ada pemetaan struktural tentang bagaimana perempuan berada dalam posisi pengambilan keputusan diplomatik tingkat tinggi.

Struktur teks pidato ini pada awalnya menyajikan narasi perempuan sebagai aktor utama dalam membawa perdamaian dan kemanusiaan, namun ketika ditelaah lebih dalam, perempuan hanya disebut sebagai bagian dari keberhasilan kolektif yang abstrak. Hal ini serupa dengan temuan Rizka Nur Amalia dan Dewi Ratnasari (2021) dalam “Jurnal Studi Komunikasi”, yang menyebutkan bahwa teks pidato politik sering kali menampilkan perempuan dalam posisi pasif, bahkan ketika membicarakan keterlibatan aktif mereka.

Retakan ini semakin tampak dalam bagian pidato yang mengklaim adanya peningkatan peran perempuan dalam diplomasi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, data Biro SDM Kementerian Luar Negeri (2022) menunjukkan bahwa hanya 15% posisi strategis dikuasai oleh perempuan. Ketidaksesuaian antara pernyataan dan data empirik ini menjadi titik krusial dalam pembacaan dekonstruktif: teks menciptakan ilusi inklusivitas yang tidak memiliki pijakan dalam struktur kekuasaan sebenarnya. Seperti disebutkan oleh Aggestam dan Towns (2018) dalam “International Affairs”,

diplomasi feminis sering kali tersandera dalam praktik simbolik yang tidak mengubah relasi kuasa substantif.

Lebih jauh, keberadaan metafora seperti “duta perdamaian” dan “jembatan antarbangsa” dalam pidato ini, jika dibaca secara literal, justru mengaburkan makna agensi perempuan. Dalam pendekatan dekonstruksi, metafora ini bukan sekadar hiasan retoris tetapi merupakan kunci untuk membaca realitas yang disembunyikan oleh teks. Sebagaimana dijelaskan oleh Eagleton (2008), metafora dalam wacana ideologis sering kali menjadi penanda utama dari struktur dominasi yang tidak tampak.

Penelitian Mulyani (2022) dalam *“Jurnal Komunikasi Politik Indonesia”* juga menunjukkan bahwa teks-teks pidato diplomatik sering membungkus relasi kekuasaan dengan bahasa harmonis dan inklusif. Ia menyatakan bahwa “konflik antarperan gender sering ditutup-tutupi oleh semangat nasionalisme yang netral gender, padahal kenyataannya aktor-aktor perempuan dibatasi aksesnya secara sistematis”. Dengan demikian, teks pidato Retno Marsudi dapat dilihat sebagai upaya pemaknaan yang ditopang oleh ketidakterbukaan terhadap posisi aktor sesungguhnya. Dalam perspektif Derrida, hal ini merupakan bagian dari “logocentrisme” dominasi makna tunggal yang meminggirkan perbedaan dan ketidaksesuaian.

Teks pidato menjadi entitas yang tampak utuh namun sebenarnya disusun oleh lapisan-lapisan makna yang saling bertentangan. Keterputusan antara klaim dan representasi, antara metafora dan kenyataan, adalah gejala dari narasi yang menutupi ketidaksetaraan. Dalam kerangka ini, pendekatan dekonstruksi justru memperlihatkan bagaimana makna-makna tersebut tidak pernah stabil, dan selalu menyimpan potensi pembacaan ulang.

Tahap Linguistik: Bahasa sebagai Arena Ketidakpastian

Pada tahap linguistik dalam pendekatan dekonstruktif Peter Barry, pembacaan diarahkan pada pemahaman bahwa bahasa tidak pernah benar-benar stabil dan justru kerap menggagalkan dirinya sendiri dalam menyampaikan makna yang definitif. Dalam konteks pidato Retno Marsudi, penggunaan bahasa diplomatik yang kaya akan simbol, metafora, serta terminologi formal seperti “kesetaraan peran perempuan,” “pengarusutamaan gender dalam diplomasi,” atau “penjaga perdamaian,” membentuk konstruksi makna yang tampak objektif dan netral. Namun, pembacaan dekonstruktif justru mengungkap bahwa bahasa tersebut menyimpan ambiguitas dan ketegangan makna yang berusaha ditutupi oleh wacana negara.

Misalnya, istilah “perempuan sebagai penjaga perdamaian” tampak afirmatif pada permukaan, tetapi jika dianalisis secara dekonstruktif, istilah ini membentuk dikotomi baru yang problematik: perempuan sebagai penjaga pasif, bukan aktor utama yang mampu menciptakan intervensi strategis dalam proses perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam pidato tersebut masih dibingkai dalam kerangka simbolik yang domestik dan komplementer. Temuan ini sejalan dengan analisis Tri Wahyuni (2020) dalam *Jurnal Kajian Politik dan Gender*, yang menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam diplomasi seringkali hanya berfungsi sebagai pelengkap narasi besar negara, tanpa ruang untuk agensi penuh atau suara kritis yang independen.

Kritik serupa juga dikemukakan oleh Cohn (2013), yang menyoroti kecenderungan bahasa diplomatik untuk mensterilkan realitas politik dan menyamarkan ketimpangan kekuasaan berbasis gender. Dalam kajian linguistik dekonstruktif, ini memperlihatkan bahwa bahasa tidak hanya gagal merepresentasikan dunia secara objektif, tetapi juga menciptakan realitas semu yang menyamarkan praktik eksklusi dan dominasi maskulin. Bahasa diplomatik menjadi semacam “kulit luar” yang tampak inklusif, tetapi sesungguhnya menyembunyikan logika patriarkal di balik retorika kesetaraan. Dekonstruksi Derrida memperkuat pemahaman ini dengan menegaskan bahwa teks tidak pernah bebas dari deferensi dan penundaan makna (*différance*), sehingga klaim final mengenai makna, seperti “diplomasi perempuan,” selalu bersifat sementara, kontekstual, dan rapuh. Teks pidato Retno Marsudi, dalam konteks ini, adalah arena permainan tanda-tanda yang tidak pernah selesai—tempat makna terus ditunda dan ditantang oleh jejak-jejak yang terpinggirkan, yang justru menjadi kunci untuk membaca ulang struktur wacana secara kritis dan subversif.

Dengan demikian, tahap linguistik memperkuat bahwa teks pidato Retno Marsudi tidak mampu menunjuk makna final tentang diplomasi perempuan. Bahasa yang digunakan justru membuka ruang interpretasi yang tak terbatas, menegaskan bahwa tidak ada makna absolut dalam teks, sebagaimana Derrida tekankan dalam prinsip *différance*.

Tabel 1. Hasil Dekonstruksi Teks Pidato Retno Marsudi

Tahapan Dekonstruksi	Temuan dalam Teks	Penafsiran Kritis
Verbal	Penggunaan kata ‘pengabdian’, ‘ibu bangsa’, dan ‘perwakilan suara Indonesia’.	Membangun citra simbolik yang paradoksal antara kekuatan dan domestikasi perempuan.
Tekstual	Inkonsistensi antara retorika kesetaraan dan fakta bahwa Retno adalah satu-satunya figur perempuan.	Mengindikasikan makna yang retak antara narasi pemberdayaan dan realitas eksklusi struktural.
Linguistik	Frasa ‘diplomasi kemanusiaan’ dan ‘kebanggaan perempuan Indonesia’ tanpa definisi operasional yang jelas.	Bahasa menjadi arena ketidakpastian makna dan gagal menunjuk makna pasti secara langsung.

Sumber: Olahan Penulis, 2025

SIMPULAN

Melalui pembacaan dekonstruktif yang terdiri atas tiga tahap verbal, textual, dan linguistik, penelitian ini menyimpulkan bahwa teks pidato Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah sebuah ruang produksi makna yang tidak stabil dan penuh kontradiksi. Meskipun secara eksplisit pidato tersebut berupaya menunjukkan keterlibatan aktif perempuan dalam diplomasi dan kesetaraan gender di ruang internasional, pembacaan mendalam justru mengungkap bahwa teks tersebut masih tunduk pada struktur wacana patriarkal yang mendominasi diplomasi Indonesia. Dalam kerangka tersebut, perempuan lebih banyak ditampilkan sebagai simbol representasi negara daripada sebagai agen yang otonom dan merdeka dalam pengambilan keputusan strategis.

Retno Marsudi sebagai tokoh perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri memang menandai tonggak sejarah penting. Namun, narasi pidatonya terikat oleh bahasa dan simbolisme negara yang kerap menyamarkan ketimpangan kekuasaan berbasis gender. Perempuan dalam pidato tersebut hadir sebagai sosok ideal yang membawa nilai-nilai damai dan humanisme, namun tidak sepenuhnya berperan sebagai aktor strategis dalam praktik diplomasi. Ini menjadikan pidato tersebut sebagai semacam “kulit luar” dari wacana negara, yang tampak inklusif namun menyimpan hierarki gender yang masih belum terurai.

Retakan-retakan makna yang ditemukan melalui pembacaan dekonstruktif menjadi pintu masuk untuk memahami ulang relasi kekuasaan dalam teks diplomasi perempuan. Di satu sisi, pidato ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam mengarusutamakan gender dalam politik luar negeri. Namun di sisi lain, ia juga memperlihatkan bahwa representasi perempuan dalam diplomasi masih berada dalam kerangka dominasi negara dan kekuasaan laki-laki. Dengan kata lain, keberhasilan simbolik yang ditampilkan tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan struktural dalam tatanan diplomasi itu sendiri.

Dekonstruksi dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan makna atau menolak sepenuhnya nilai-nilai yang dibawa oleh teks, melainkan untuk membuka kemungkinan makna-makna alternatif terutama yang bersifat marginal dan selama ini tersembunyi di balik struktur wacana dominan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap studi komunikasi politik dan gender, serta memperluas cakrawala kritis dalam melihat teks politik yang tampaknya netral namun menyimpan bias ideologis. Di tengah minimnya kajian mendalam mengenai

diplomasi perempuan di Indonesia, pendekatan dekonstruktif ini dapat menjadi strategi intelektual untuk meruntuhkan mitos stabilitas makna dan membuka ruang bagi pemaknaan ulang atas peran perempuan dalam diplomasi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggestam, K., & Towns, A. E. (2018). The gender turn in diplomacy: A new research agenda. *International Feminist Journal of Politics*, 21(1), 9–28. <https://doi.org/10.1080/14616742.2018.1483206>
- Aggestam, K., & Towns, A. E. (2019). The gender turn in diplomacy: A new research agenda. *International Feminist Journal of Politics*, 21(1), 9–28. <https://doi.org/10.1080/14616742.2018.1483206>
- Ardianto, H. (2021). Dekonstruksi makna perempuan dalam iklan kosmetik Wardah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 121–134. <https://doi.org/10.24002/jik.v18i2.4321>
- Carpentier, N. (2015). Differentiating Lyotard: The postmodern and the inhuman. *Theory, Culture & Society*, 32(3), 155–181. <https://doi.org/10.1177/0263276414561094>
- Cohn, C. (2013). Women and wars: Toward a conceptual framework. In C. Cohn (Ed.), *Women and wars* (pp. 1–35). Polity Press.
- Eagleton, T. (2008). *Literary theory: An introduction*. University of Minnesota Press.
- Hidayat, A. (2021). Analisis wacana dekonstruksi pada teks pidato politik presiden. *Wacana: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 34–47. <https://doi.org/10.25008/wacana.v20i1.827>
- Mohan, T. R. (2022). Derrida and the ambiguity of meaning: Deconstruction and the play of differences. *Philosophy and Literature*, 46(2), 265–282. <https://doi.org/10.1353/phl.2022.0021>
- Mulyani, N. (2022). Retorika dan Ideologi Gender dalam Pidato Politik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*, 5(2), 145–158. <https://journal.unpad.ac.id/jkpi/article/view/45678>
- Nur Amalia, R., & Ratnasari, D. (2021). Representasi Perempuan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Indonesia: Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(3), 417–431. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/view/4103>
- Papacharissi, Z. (2015). Affective publics and structures of storytelling: Sentiment, events and mediality. *Information, Communication & Society*, 19(3), 307–324. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1109697>
- Salmieri, G. (2016). Existentialism and feminism: Simone de Beauvoir's The Second Sex. *Journal of French and Francophone Philosophy*, 24(1), 65–78. <https://doi.org/10.5195/jffp.2016.766>
- Sari, R. P. (2020). Representasi identitas dalam teks media: Pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida. *Jurnal Komunikasi UMY*, 12(1), 75–88.
- Sumertha, G., Saragih, H. J. R., & Astried, S. (2020). Indonesian female peacekeepers participation in United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) during 2015–2017. *Athens Journal of Mediterranean Studies*, 7(1), 29–44. <https://doi.org/10.30958/ajms.712>
- Tri Wahyuni. (2020). Perempuan dalam Wacana Politik di Indonesia: Kajian Kritis terhadap Retorika Gender. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(1), 22–36. <https://jurnal.upnjatim.ac.id/index.php/komunikasidanmedia/article/view/1512>
- Wulandari, A. (2020). Kaum perempuan dalam diplomasi kebudayaan Indonesia, 1945–1960an. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 6(2), 319–342.
- Wulandari, A. (2021). Di balik meja perundingan: Tiga diplomat perempuan dalam misi diplomasi Indonesia (1946–1960an). Skripsi Bachelor, Universitas Gadjah Mada.